

SKRIPSI

**PERANAN DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA DALAM
PEMBANGUNAN EKOWISATA DI KABUPATEN KERINCI**



OLEH

FIKRI ANDRE SETIAWAN

1710012111087

BAGIAN HUKUM TATA NEGARA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BUNG HATTA

PADANG

2021

No. Reg : 09/HTN/FH/VIII-2021

**PERANAN DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA DALAM
PEMBANGUNAN EKOWISATA DI KABUPATEN KERINCI**

Fikri Andre Setiawan', Nurbeti, S.H.M.H '

1Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email : fikriandre2015@gmail.com

ABSTRAK

Peranan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam pembangunan ekowisata adalah melakukan tugas pemerintah dengan mengelola pariwisata dan kebudayaan yang ada di suatu daerah. Dalam pengelolaan ekowisata di Kabupaten Kerinci ekowisata dikelola oleh Balai Taman Nasional Kerinci Seblat sebagai perpanjangan tangan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Rumusan masalah: 1) Bagaimanakah pelaksanaan tugas dan wewenang Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam pembangunan ekowisata di Kabupaten Kerinci. 2) Kendala-kendala apakah yang dihadapi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam pembangunan ekowisata di Kabupaten Kerinci. 3) Upaya-upaya apakah yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala yang dihadapi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam pembangunan ekowisata di Kabupaten Kerinci. Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian Hukum Sosiologis. Data yang digunakan: data primer dan sekunder, teknik pengumpulan data: wawancara, studi dokumen dan data analisa secara kualitatif : 1) Pelaksanaan tugas dan wewenang Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kerinci sebagai pengawas, pembuat regulasi yang mendukung pembangunan ekowisata Kabupaten Kerinci dan ekowisata dikelola oleh Balai Taman Nasional Kerinci Seblat sebagai perpanjangan tangan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. 2) Kendala-kendala yang dihadapi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kerinci dalam pembangunan ekowisata adalah masyarakat yang belum paham pentingnya menjaga ekowisata. 3) Upaya yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam mengatasi kendala-kendala tersebut dengan meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang pentingnya menjaga ekowisata.

Kata Kunci : Ekowisata, Kabupaten Kerinci, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

KATA PENGANTAR



Syukur alhamdulillahirabbil'alamin, rabbisrahli saddri wayasirli ambri wahlul u'datammillisani yafkahu kaulin. Puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT karena atas berkah, rahmat dan karunia-Nya yang telah memberikan anugerah kesehatan dan kelancaran sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Serta shalawat dan salam disampaikan kepada baginda nabi besar Muhammad SAW, Allahummasali'alla Muhammad wa'alaali Muhammad. Dalam hal ini penulis menulis skripsi yang berjudul **“PERANAN DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA DALAM PEMBANGUNAN EKOWISATA DI KABUPATEN KERINCI”**

Penulisan skripsi ini diselesaikan dalam rangka untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Ilmu Hukum Universitas Bung Hatta. Penulisan skripsi ini membutuhkan waktu yang cukup lama, sehingga banyak hikmah yang penulis dapatkan, terutama tentang kesabaran, ketekunan, dan ketelitian dalam bekerja. Penulis menyadari bahwa skripsi ini bukanlah akhir dari perjuangan, melainkan justru awal dari perjuangan panjang dalam meraih masa depan. Penulis masih mengharapkan banyak dukungan dan do'a restu dari pembaca semua agar perjuangan ini masih dapat terus berlanjut.

Dalam penulisan skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan serta bimbingan dan dorongan moril maupun materil dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terimakasih

banyak kepada Ibu **Nurbeti S.H.M.H** sebagai Dosen Pembimbing dimana dalam penulisan skripsi ini telah banyak meluangkan waktu, membantu dan memberikan pengarahan, nasehat maupun saran agar penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini tidak akan dapat terselesaikan tanpa bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya serta penghormatan yang dalam kepada:

1. Ibu Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M. Hum., Dekan Fakultas Ilmu Hukum Universitas Bung Hatta serta Penasihat Akademik saya yang banyak mendukung selama kuliah dalam mencapai tujuan.
2. Ibu Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M.H., Wakil Dekan Fakultas Ilmu Hukum Universitas Bung Hatta.
3. Bapak Dr. Desmal Fajri, S.Ag., M.H., Ketua Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Ilmu Hukum Universitas Bung Hatta.
4. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ilmu Hukum Universitas Bung Hatta, terima kasih atas ilmu yang telah diberikan kepada penulis, selama menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta ini.
5. Seluruh tenaga kependidikan Universitas Bung Hatta, khususnya Fakultas Ilmu Hukum yang telah membantu dan memberikan ilmu pengetahuan selama penulis menempuh kuliah.
6. Seluruh pegawai Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang telah membantu memberikan data dan informasi sehingga tugas akhir ini dapat diselesaikan.
7. Kepada kedua Orang Tua penulis, Ayahanda Julisman dan Ibunda Nelfiarti serta Kakak penulis yaitu Tiara Yunela dan seluruh keluarga besar penulis, terima

kasih atas curahan kasih sayang, dorongan do'a, nasihat, semangat, motivasi, dan pengorbanan materilnya selama penulis menempuh studi di Fakultas Ilmu Hukum Universitas Bung Hatta.

8. Rekan-rekan Seperjuangan Mahasiswa Fakultas Ilmu Hukum Universitas Bung Hatta, khususnya angkatan 2017.
9. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu dan berjasa dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh sebab itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi rekanrekan mahasiswa Ilmu Hukum khususnya dan para pembaca umumnya, akhir kata penulis ucapkan terima kasih.

Padang, Agustus 2021
Penulis,

FIKRI ANDRE SETIAWAN

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan Penelitian	3
D. Metode penelitian.....	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
A. Tinjauan Tentang Ekowisata	7
1. Pengertian Ekowisata	7
2. Prinsip-prinsip Ekowisata.....	7
B. Tinjauan Mengenai Pengembangan Wisata	8
1. Pengertian Pengembangan Wisata	8
2. Dampak Pengembangan Wisata	10
3. Strategi Pengembangan Pariwisata	12
C. Tinjauan Tentang Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.....	14
1. Tugas dan Wewenang	14
2. Struktur Organisasi.....	15
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	16

A.	Pelaksanaan tugas dan wewenang Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam pembangunan Ekowisata di Kabupaten Kerinci	16
B.	Kendala-kendala yang dihadapi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam pembangunan ekowisata di Kabupaten Kerinci.....	46
C.	Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala yang dihadapi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam pembangunan ekowisata di Kabupaten Kerinci.....	48
BAB IV PENUTUP		50
A.	Simpulan.....	50
B.	Saran	51
DAFTAR PUSTAKA		

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak ragam budaya, adat istiadat dan kebudayaan-kebudayaan lainnya. pariwisata telah menjadi salah satu industri terbesar di dunia dan merupakan andalan utama dalam menghasilkan devisa diberbagai negara. Pengembangan pariwisata di Indonesia pada dasarnya menggunakan konsep pariwisata budaya (*cultural tourism*) seperti telah ditetapkan hal ini dilakukan tentunya dengan pertimbangan bahwa Indonesia memiliki potensi seni dan budaya yang beraneka ragam yang tersebar pada tiap daerah tujuan wisata di Indoensia.¹

Dalam mengolah dan mengelola sumber-sumber alam, perlu diperhatikan keharusan melestarikan sumber-sumber alam dengan bertanggungjawab. Dengan cara demikian, sumber-sumber alam itu tetap utuh untuk dimanfaatkan secara berkesinambungan tidak hanya untuk generasi sekarang tetapi lebih-lebih untuk generasi yang akan datang. Di sinilah pentingnya peranan ekowisata. Ekowisata tidak akan bisa eksis kalau sumber-sumber alam tidak dikendalikan.

Pembangunan pariwisata harus memperhatikan aspek kelestarian lingkungan hidup karena menyangkut kebutuhan generasi yang akan datang. Mewarisi alam dan lingkungan hidup yang lestari kepada anak cucu dan generasi yang akan datang adalah kewajiban kita sebagai bangsa yang beradap sebagaimana

¹ Oka A. Yoeh, et.all, 2006, *Pariwisata Budaya Masalah Dan Solusinya*, PT Pradnya Paramita, Jakarta, hlm.1.

dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 3 huruf f dan huruf g bahwa Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan untuk menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan dan menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia.

Kabupaten Kerinci yang memiliki potensi pariwisata, tentu saja harus memanfaatkan keadaan ini untuk membangun perekonomian daerahnya. Letak geografis Kabupaten Kerinci yang cukup strategis menjadikannya sangat menguntungkan, karena daerah ini merupakan salah satu daerah yang memiliki banyak wisata alam di Provinsi Jambi. Sangat diharapkan pemerintah daerah Kabupaten Kerinci mampu mengembangkan dan memanfaatkan potensi di sektor pariwisata ini. Keberhasilan pengembangan sektor kepariwisataan, berarti akan meningkatkan perannya dalam penerimaan daerah. Dalam pengembangan pariwisata pemerintah Kabupaten Kerinci kurang memanfaatkan kecanggihan teknologi untuk dapat memberi gambaran yang efektif dan efisien terhadap wisata yang ada di Kabupaten Kerinci. Namun dari pemeliharaan sarana dan prasarana serta fasilitas yang ada di objek wisata banyak kerusakan terhadap fasilitas, hal tersebut membuktikan lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh aparatur pemerintah dinas pariwisata. Selain itu kurangnya sarana penunjang pariwisata seperti akomodasi, rumah, makan dan sarana lainnya yang membuat potensi objek wisata kurang menarik untuk dikunjungi, sehingga para wisatawan juga merasa kurang nyaman dan wisatawan kurang berminat untuk mengunjungi objek wisata tersebut, hal ini dapat memberi efek terhadap penurunan pendapatan asli daerah.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis telah melakukan penelitian yang telah disusun dalam bentuk skripsi dengan judul **“PERAN DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA DALAM PEMBANGUNAN EKOWISATA DI KABUPATEN KERINCI”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pelaksanaan tugas dan wewenang Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam pembangunan ekowisata di Kabupaten Kerinci?
2. Kendala-kendala apakah yang dihadapi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam pembangunan ekowisata di Kabupaten Kerinci?
3. Upaya-upaya apakah yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala yang dihadapi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam pembangunan ekowisata di Kabupaten Kerinci?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisa pelaksanaan tugas dan wewenang Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam pembangunan ekowisata di Kabupaten Kerinci.
2. Untuk menganalisa kendala-kendala yang dihadapi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam pembangunan ekowisata di Kabupaten Kerinci.
3. Untuk menganalisa upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala yang dihadapi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam pembangunan ekowisata Kabupaten Kerinci.

D. Metode penelitian

Metode penelitian sangat penting untuk mendukung penulis dalam mendapatkan data dan segala yang dibutuhkan dalam penelitian hukum ini. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yang dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji penelitian hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat² Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dikumpulkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.³

2. Metode Pendekatan

Pada penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif yaitu suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang dinyatakan secara tertulis atau lisan serta juga

² Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.15

³ Ibid, hlm.16

tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.⁴

3. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas. Sumber data diperoleh dari lapangan secara langsung dengan wawancara kepada Bapak Leo Candra Gusnadi, S.S.st.Par.M.Si. selaku Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Wisata.
- b. Data sekunder adalah data-data yang diperoleh dari buku-buku sebagai data pelengkap sumber data primer. Sumber data sekunder penelitian ini adalah data-data yang diperoleh dengan melakukan kajian pustaka seperti buku-buku ilmiah, hasil penelitian dan sebagainya. Data sekunder mencakup dokumen-dokumen, buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, dan seterusnya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- a) Wawancara

Jenis wawancara yang akan digunakan peneliti adalah wawancara semi terstruktur, dimana peneliti akan membuat daftar pertanyaan yang akan ditanyakan pada saat wawancara.

- b) Studi Dokumen

⁴ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm.192.

Studi dokumen adalah teknik untuk pengumpulan data yaitu dengan cara membaca dan mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku dan literatur dan artikel maupun dokumen-dokumen yang dapat mendukung permasalahan yang ingin dibahas.

5. Analisis Data

Berdasarkan bahan dan data yang dikumpulkan baik data primer dan sekunder disusun secara sistematis dan dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif yaitu analisis data yang dilakukan dimana data sudah diperoleh kemudian diolah dan diuraikan dalam bentuk kalimat yang disusun sedemikian rupa dan memberikan pengertian-pengertian terhadap data lalu diperoleh kesimpulan sesuai dengan permasalahan yang dibahas di penelitian ini

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Ekowisata

1. Pengertian Ekowisata

Ekowisata adalah suatu jenis pariwisata yang berwawasan lingkungan dengan aktivitas melihat, menyaksikan, mempelajari, mengagumi alam, flora dan fauna, sosial-budaya etnis setempat, dan wisatawan yang melakukannya ikut membina kelestarian lingkungan alam di sekitarnya dengan melibatkan penduduk lokal.⁵ Kegiatan perjalanan wisata yang dikemas secara profesional, terlatih, dan memuat unsur pendidikan, sebagai suatu sektor/usaha ekonomi, yang mempertimbangkan warisan budaya, partisipasi dan kesejahteraan penduduk lokal serta upaya-upaya konservasi sumberdaya alam dan lingkungan.⁶

2. Prinsip-prinsip Ekowisata

Menurut Page dan Ross, ekowisata terdiri dari tiga prinsip utama, yaitu prinsip konservasi, prinsip partisipasi masyarakat dan prinsip ekonomi. Adapun penjelasan prinsip-prinsip ekowisata adalah sebagai berikut:

a) Prinsip Konservasi

⁵ Yoeti, O. A., 2015, *Ecotourism, Pariwisata Berwawasan Lingkungan*, <https://studipariwisata.com/analisis/ecotourism-pariwisata-berwawasan-lingkungan/#:~:text=Ekowisata%20adalah%20suatu%20jenis%20pariwisata,sekitarnya%20dengan%20melibatkan%20penduduk%20lokal>. Diakses 11 December 2020 jam 22.40 Wib

⁶ Iwan Nugroho, 2015, *Ekowisata dan Pembangunan Berkelanjutan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 17.

Prinsip konservasi artinya memiliki kepedulian, tanggung jawab dan komitmen terhadap pelestarian lingkungan alam dan budaya, melaksanakan kaidah-kaidah usaha yang bertanggung jawab dan ekonomi berkelanjutan. Prinsip konservasi alam memiliki kepedulian, tanggung jawab dan komitmen terhadap pelestarian alam serta pembangunan yang mengikuti kaidah ekologis, sedangkan prinsip konservasi budaya adalah kepekaan dan penghormatan kepada nilai-nilai sosial budaya dan tradisi keagamaan masyarakat setempat.

b) Prinsip Partisipasi Masyarakat

Perencanaan dan pengembangan ekowisata harus melibatkan masyarakat setempat secara optimal.

c) Prinsip Ekonomi

Pengembangan ekowisata dilaksanakan secara efisien, dimana dilakukan pengaturan sumberdaya alam sehingga pemanfaatannya yang berkelanjutan dapat mendukung generasi masa depan.⁷

B. Tinjauan Mengenai Pengembangan Wisata

1. Pengertian Pengembangan Wisata

Pengembangan pariwisata menurut soekadijo adalah untuk mendorong perkembangan beberapa sektor ekonomi seperti meningkatkan urbanisasi karena pertumbuhan serta perbaikan fasilitas pariwisata, mengubah industri-industri baru yang berkaitan dengan

⁷ Page S.J., dan Ross, D.K. 2002. *Ecotourism Pearson Education Limited*, Prentice Hall, Pearson Education, China. <https://www.kajianpustaka.com/2019/12/ekowisata-pengertian-prinsip-karakteristik-dan-jenis.html>. Diakses 11 December 2020 jam 23.00 Wib

jasa-jasa wisata, memperluas pasar barang-barang lokal, dan juga memberi dampak positif bagi tenaga kerja karena pariwisata dapat memperluas tenaga kerja baru. Pengembangan sektor pariwisata ditujukan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan serta dapat memberikan manfaat terhadap pemenuhan kebutuhan masyarakat. Dengan mengembangkan sektor pariwisata ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap penyelenggaraan pemerintah terutama dari segi pembiayaan pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah. Menurut Marpaung pengembangan pariwisata bertujuan untuk memberikan keuntungan baik bagi wisatawan maupun warga setempat.⁸

Menurut Sunaryo mengungkapkan bahwa pengembangan pariwisata memberikan manfaat pada aspek utama dalam bidang ekonomi, yakni mampu menciptakan lapangan pekerjaan di sektor pariwisata sehingga pendapatan masyarakat dapat berkembang. Dalam dimensi sosial yakni peningkatan kebanggaan komunitas dan dimensi budaya yakni mendorong masyarakat untuk menghormati nilai budaya yang ada. Dimensi lingkungan dengan indikator terjaganya daya dukung lingkungan, adanya sistem pengelolaan sampah yang baik, meningkatnya kepedulian akan perlunya konservasi dan preservasi lingkungan.⁹

⁸ I Nyoman Sudiarta, Putu Eka Wirawan, 2018, *Daya Tarik Wisata Jogging Track*, Nilacakra, Bali, hlm. 1-2.

⁹ Bambang Sunaryo, 2013, *Kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata*, Gava Media, Yogyakarta, hlm.197.

Menurut Suwanto, Langkah pokok dalam pengembangan pariwisata berupa optimasi, konsolidasi dan pengembangan dan penyebaran dalam jangka panjang adalah Mempertajam dan memantapkan citra kepariwisataan, Meningkatkan mutu kerja, Meningkatkan kemampuan pengelolaan, Manfaatkan produk yang ada, Memperbesar saham dari pasar wisata yang telah ada.¹⁰

2. Dampak Pengembangan Wisata

Aktivitas pariwisata menggerakkan pelaku pariwisata bidang ekonomi karena adanya supply dan demand terhadap produk barang dan jasa. Wisatawan meningkatkan permintaan terhadap barang dan jasa, masyarakat pelaku bisnis memasok produknya untuk menangkap apa yang dibutuhkan wisatawan. Secara umum dampak pariwisata terhadap perekonomian seperti yang dikemukakan Cohen adalah:

- a) Dampak terhadap penerimaan devisa
- b) Dampak terhadap pendapatan masyarakat
- c) Dampak terhadap kesempatan kerja
- d) Dampak terhadap harga-harga
- e) Dampak terhadap distribusi
- f) Dampak terhadap kepemilikan dan control
- g) Dampak terhadap pada pembangunan pada umumnya
- h) Dampak terhadap pendapatan pemerintah¹¹

¹⁰ Gamal Suwanto, 2004, *Dasar-Dasar Pariwisata*, Andi, Yogyakarta, .hlm. 55.

¹¹ Arjana, I Gusti Bagus. 2016, *Geografi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif*, Rajawali Pers, Jakarta, .hlm.157.

Dampak pengembangan pariwisata dapat berupa dampak positif dan negatif, yakni sebagai berikut: Dampak positif dari pengembangan pariwisata yakni sebagai berikut:

- a) Memberikan pekerjaan dan penghasilan kepada masyarakat daerah setempat dilokasi pariwisata dikembangkan.
- b) Menghasilkan devisa bagi negara yang bersangkutan.
- c) Sebagai perangsang bagi pengembangan aktivitas-aktivitas ekonomi lainnya, misalnya pertanian, pengrajin, dll.
- d) Dapat membantu membiayai pembangunan prasarana yang mempunyai manfaat serba guna.
- e) Merupakan perangsang dan dapat membantu membiayai pemeliharaan monumen-monumen budaya, misalnya candi Borobudur.
- f) Merupakan dorongan untuk melindungi dan untuk menghidupkan kembali pola-pola budaya yang tradisional. Misalnya tarian, musik, upacara adat, pakaian dll.
- g) Memberikan dorongan untuk memperbaiki dan mempertahankan lingkungan hidup yang bersih dan menarik karena hal ini penting bagi berhasilnya pariwisata.
- h) Dapat memberikan rangsangan untuk melindungi dan memelihara ciri-ciri khas lingkungan yang khusus misalnya pantai-pantai, taman-taman dll.
- i) Tukar menukar kebudayaan (internasional dan dalam negeri).
- j) Berkembangnya pendidikan kejuruan dan pertukaran pendidikan.

- k) Mengembangkan kemampuan teknis dan pengelolaan penduduk setempat dengan cara mempekerjakan mereka disektor pariwisata.¹²

3. Strategi Pengembangan Pariwisata

Strategi pengembangan pariwisata dapat ditempuh melalui:

- a) Obyek daya tarik wisata yang mencakup keunikan dan daya tarik berbasis alam, budaya, maupun buatan/artificial.

Menurut Suwena, atraksi atau obyek daya tarik wisata (ODTW) merupakan komponen yang signifikan dalam menarik kedatangan wisatawan. Hal yang dapat dikembangkan menjadi atraksi wisata disebut dengan modal atau sumber kepariwisataan. Modal atraksi yang menarik kedatangan wisatawan ada tiga, yaitu Natural Resources (alami) seperti gunung, danau, Pantai dan bukit, Atraksi wisata budaya seperti arsitektur rumah tradisional di desa, situs arkeologi, seni dan kerajinan, ritual, festival, kehidupan masyarakat sehari-hari, keramahtamahan, makanan dan Atraksi buatan seperti acara olahraga, berbelanja, pameran, konferensi dan lain-lain.

- b) Aksesibilitas yang mencakup kemudahan sarana dan sistem transportasi, Menurut Sunaryo, aksesibilitas pariwisata dimaksudkan sebagai “segenap sarana yang memberikan kemudahan kepada wisatawan untuk mencapai suatu destinasi maupun tujuan wisata terkait”. Menurut French dalam Sunaryo menyebutkan faktor-faktor yang penting dan terkait dengan aspek

¹² Muljadi, 2010, *Kepariwisata dan Perjalanan*, Raja Grafindo, Jakarta. hlm.83.

aksesibilitas wisata meliputi petunjuk arah, bandara, terminal, waktu yang dibutuhkan, biaya perjalanan, frekuensi transportasi menuju lokasi wisata dan perangkat lainnya.

- c) Amenitas yang mencakup fasilitas penunjang dan pendukung wisata. Sugiama menjelaskan bahwa amenitas meliputi “serangkaian fasilitas untuk memenuhi kebutuhan akomodasi, penyediaan makanan dan minuman, tempat hiburan, tempat-tempat perbelanjaan dan layanan lainnya”. French dalam Sunaryo memberikan batasan bahwa amenitas bukan merupakan daya tarik bagi wisatawan, namun dengan kurangnya amenitas akan menjadikan wisatawan menghindari destinasi tertentu.
- d) Fasilitas umum yang mendukung kegiatan pariwisata. Sunaryo menjelaskan ancillary service lebih kepada ketersediaan sarana dan fasilitas umum yang digunakan oleh wisatawan yang juga mendukung terselenggaranya kegiatan wisata seperti bank, ATM, telekomunikasi, rumah sakit dan sebagainya. Sedangkan Sugiama menjelaskan bahwa ancillary service mencakup keberadaan berbagai organisasi untuk memfasilitasi dan mendorong pengembangan serta pemasaran kepariwisataan destinasi bersangkutan.
- e) Kelembagaan yang memiliki kewenangan, tanggung jawab dan peran dalam mendukung terlaksananya kegiatan pariwisata. Kelembagaan kepariwisataan dijelaskan dalam UU tentang Kepariwisata nomor 10 tahun 2009 sebagai “keseluruhan institusi

pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah, swasta dan masyarakat, sumberdaya manusia, mekanisme operasional serta regulasi yang terkait dengan kepariwisataan”¹³

C. Tinjauan Tentang Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

1. Tugas dan Wewenang

Berdasarkan PERDA Kabupaten Kerinci No 2 Pasal 6 Tahun 2018 Tentang penyelenggaraan pariwisata, Pemerintah Daerah memiliki wewenang:

- a) menyusun dan menetapkan rencana induk pembangunan kepariwisataan;
- b) menetapkan destinasi pariwisata;
- c) menetapkan daya tarik wisata;
- d) melaksanakan pendaftaran, pencatatan, dan pendataan pendaftaran usaha pariwisata;
- e) mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan kepariwisataan;
- f) memfasilitasi dan melakukan promosi destinasi pariwisata dan produk pariwisata;
- g) memfasilitasi pengembangan daya tarik wisata baru;
- h) menyelenggarakan pelatihan dan penelitian kepariwisataan;
- i) memelihara dan melestarikan daya tarik wisata;
- j) menyelenggarakan birnbingan masyarakat sadar wisata; dan
- k) mengalokasikan anggaran pariwisata.

¹³ Khotimah, K., & Wilopo, W. 2017, *Strategi pengembangan destinasi pariwisata budaya* (Studi kasus pada kawasan Situs Trowulan sebagai Pariwisata Budaya Unggulan di Kabupaten Mojokerto). *Jurnal Administrasi Bisnis*, 42(1), 56-65.

2. Struktur Organisasi

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan terdiri dari :

- a) Kepala Dinas;
- b) Sekretariat;
- c) Bidang Pengembangan Destinasi Wisata;
- d) Bidang Pemasaran Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- e) Bidang Kebudayaan;
- f) Unit Pelaksana Teknis Daerah ; dan
- g) Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan tugas dan wewenang Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam pembangunan Ekowisata di Kabupaten Kerinci

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kerinci merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang kebudayaan dan bidang pariwisata yang menjadi kewenangan daerah. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kerinci sebagaimana mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dibidang kebudayaan dan dibidang pariwisata yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten.

Di dalam pengembangan ekowisata di Kabupaten Kerinci, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai tugas dan wewenang dalam pembangunan ekowisata di Kabupaten Kerinci. Adapun tugas dan wewenang Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kerinci adalah melakukan pengawasan dan membuat kebijakan atau regulasi yang mendukung pembangunan ekowisata di Kabupaten Kerinci dan ekowisata dikelola oleh Balai Taman Nasional Kerinci Seblat sebagai perpanjangan tangan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam menjaga lingkungan hidup, lingkungan sosial dan adat di daerah ekowisata.¹⁴

Proses penting dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kerinci ini adalah pemahaman awal posisi Kabupaten Kerinci yang unik atau berbeda dengan daerah lain pada

¹⁴ Wawancara dengan Leo Candra Gusnadi, selaku Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Wisata, pada tanggal 16 Juni 2021 pukul 01.30 WIB

umumnya. Keunikan ini muncul dari faktor karakteristik geografis serta sejarahnya. Penyusunan RPJMD Kabupaten Kerinci Tahun 2019-2024 melalui berbagai tahapan analisis sektoral, penjaringan aspirasi masyarakat, serta dialog yang melibatkan stakeholders dan pemangku kepentingan.

Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten (RIPPAR-KAB) Kabupaten Kerinci memiliki beberapa aspek yaitu :

1. Aspek Perencanaan Pembangunan Obyek Wisata Alam yang antara lain mencakup sistem perencanaan kawasan, penataan ruang (tata ruang wilayah), standarisasi, identifikasi potensi, koordinasi lintas sektoral, pendanaan, dan sistem informasi obyek wisata alam.
2. Aspek Kelembagaan meliputi pemanfaatan dan peningkatan kapasitas institusi, sebagai mekanisme yang dapat mengatur berbagai kepentingan, secara operasional merupakan organisasi dengan Sumber Daya Manusia dan peraturan yang sesuai dan memiliki efisiensi tinggi.
3. Aspek Sarana dan Prasarana yang memiliki dua sisi kepentingan, yaitu (a) alat memenuhi kebutuhan pariwisata alam, (b) sebagai pengendalian dalam rangka memelihara keseimbangan lingkungan, pembangunan sarana dan prasarana dapat meningkatkan daya dukung sehingga upaya pemanfaatan dapat dilakukan secara optimal.
4. Aspek Pengelolaan, yaitu dengan mengembangkan profesionalisme dan pola pengelolaan obyek wisata alam yang siap mendukung kegiatan pariwisata alam dan mampu memanfaatkan potensi obyek wisata alam secara lestari.

5. Aspek Pengusahaan yang memberi kesempatan dan mengatur pemanfaatan obyek wisata alam untuk tujuan pariwisata yang bersifat komersial kepada pihak ketiga dan membuka lapangan kerja bagi masyarakat setempat.
6. Aspek Pemasaran dengan mempergunakan teknologi tinggi dan bekerja sama dengan berbagai pihak baik dalam negeri maupun luar negeri.
7. Aspek Peran Serta Masyarakat melalui kesempatan-kesempatan usaha sehingga ikut membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
8. Aspek Penelitian dan Pengembangan yang meliputi aspek fisik lingkungan, dan sosial ekonomi dari obyek wisata alam. Diharapkan nantinya mampu menyediakan informasi bagi pengembangan dan pembangunan kawasan, kebijaksanaan dan arahan pemanfaatan obyek wisata alam.

Muatan Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Kabupaten Kerinci ini memuat potensi dan permasalahan pembangunan kepariwisataan, isu-isu strategis yang harus dijawab, posisi pembangunan kepariwisataan dalam kebijakan pembangunan wilayah dan kepariwisataan, visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi, rencana, dan indikasi program pembangunan kepariwisataan. Rumusan rencananya akan difokuskan pada rencana pembangunan perwilayahan pariwisata yang merupakan penjabaran teknis dari strategi pembangunan destinasi pariwisata.

Dalam merumuskan strategi yang tepat bagi pengembangan pariwisata Kabupaten Kerinci, maka dilakukanlah analisis terhadap nilai-nilai strategis yang dimiliki oleh daerah, analisis terhadap faktor-faktor internal maupun eksternal. Faktor tersebut harus diidentifikasi dan diperhitungkan dengan melakukan analisis yang bersifat strategis yang kemudian menghasilkan isu-isu

strategis. maka upaya untuk memilih dan menentukan strategi yang efektif dan efisien membuahkan hasil yang diharapkan adalah sebagai berikut:

1. Strategi Perwilayahan Destinasi Pariwisata

Perwilayahan destinasi pariwisata adalah hasil perwilayahan pembangunan kepariwisataan yang diwujudkan dalam bentuk Koridor Pariwisata Daerah dan Destinasi Parawisata Unggulan Daerah. Koridor Pariwisata Daerah atau yang disebut juga dengan KPD, adalah merupakan kawasan geografis yang berada dalam satu wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata daerah. Dengan memperhatikan fungsi pariwisata sebagai salah satu sector yang akan dijadikan sebagai pemicu untuk berkembangnya sector lainnya, maka ditetapkan beberapa Koridor Pariwisata Daerah Kabupaten Kerinci diantaranya adalah :

- a. Koridor Pariwisata Daerah (KPD) Gunung Kerinci yang meliputi beberapa kawasan wisata potensial, diantaranya:
 - 1) Danau Gunung Tujuh
 - 2) Air Terjun Telun Berasap
 - 3) Danau Belibis
 - 4) Rawa Bento
 - 5) Gua Kasah
 - 6) Rawa Ladeh Panjang
- b. Koridor Pariwisata Daerah (KPD) Danau Kerinci yang meliputi beberapa kawasan wisata potensial, diantaranya ;
 - 1) Danau Kaco
 - 2) Grao Rasau

- 3) Danau Duo
 - 4) Air Terjun Siluang Bersisik Emas
 - 5) Danau Nyalo
 - 6) Danau Lingkat
- c. Koridor Pariwisata Daerah (KPD) Air Hangat Semurup yang meliputi beberapa kawasan wisata potensial, diantaranya :
- 1) Air Panas Semurup
 - 2) Air Terjun Sungai Medang

Destinasi Pariwisata Unggulan Daerah atau yang disebut juga dengan (DPUD) adalah satu atau lebih daerah tujuan wisata yang terdapat di Koridor Pariwisata Daerah yang memiliki sumber daya pariwisata potensial serta mempunyai pengaruh penting dalam pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup dan daya saing daerah. Kriteria penetapan Destinasi Pariwisata Unggulan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pengertian tersebut diatas ditetapkan sebagai berikut :

- a. Ketersediaan sumberdaya dan daya tarik wisata
- b. Fasilitas pariwisata dan fasilitas umum;
- c. Aksesibilitas;
- d. Kesiapan dan keterlibatan masyarakat;
- e. Potensi pasar
- f. Posisi strategis pariwisata dalam pembangunan daerah.

Selanjutnya dengan memperhatikan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman pengembangan pariwisata dimasa akan datang, maka didapat

(3) strategi perwilayahan destinasi pariwisata yang merupakan gabungan dari (4) kombinasi strategi. Keempat strategi dimaksud adalah:

- a. Perencanaan pembangunan Koridor Pariwisata Daerah dan Destinasi Pariwisata Unggulan Daerah
- b. Penegakan regulasi pembangunan Koridor Pariwisata Daerah dan Destinasi Pariwisata Unggulan Daerah
- c. Pengendalian implementasi pembangunan Koridor Pariwisata Daerah dan Destinasi Pariwisata Unggulan Daerah.

Strategi untuk perencanaan pembangunan Koridor Pariwisata Daerah dan Destinasi Pariwisata Unggulan Daerah sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana induk dan rencana detail pembangunan Koridor Pariwisata Daerah dan Destinasi Pariwisata Unggulan Daerah
- b. Menyusun regulasi tata bangunan dan tata lingkungan Koridor Pariwisata Daerah dan Destinasi Pariwisata Unggulan Daerah.

Strategi untuk penegakan regulasi pembangunan Koridor Pariwisata Daerah dan Destinasi Pariwisata Unggulan Daerah dilakukan melalui monitorong dan pengawasan.Strategi untuk pengendalian implementasi pembangunan Koridor Pariwisata Daerah dan Destinasi Pariwisata Unggulan Daerah dilakukan melalui peningkatan koordinasi antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah kabupaten/kota, pelaku usaha, dan masyarakat.

2. Pembangunan Daya Tarik Wisata

Pembangunan Daya Tarik Wisata meliputi; daya tarik wisata alam, daya tarik wisata budaya dan daya tarik wisata hasil buatan manusia.

Kebijakan pembangunan daya tarik wisata di Kabupaten Kerinci sebagai berikut:

- a. Pengembangan daya tarik wisata dalam rangka mendorong pertumbuhan Koridor Pariwisata Daerah
- b. Pembangunan daya tarik wisata untuk meningkatkan daya saing produk dalam menarik minat dan loyalitas segmen pasar yang ada
- c. Pemantapan daya tarik wisata untuk meningkatkan daya saing produk dalam menarik kunjungan ulang wisatawan dan segmen pasar yang lebih luas.

Untuk mendukung kebijakan tersebut, perlu dirumuskan beberapa strategi sebagai berikut:

- a. Melakukan inovasi terhadap daya tarik wisata pada masing-masing koridor Pariwisata Daerah.
 - b. Mengembangkan inovasi manajemen produk dan kapasitas daya tarik wisata untuk mendorong akselerasi perkembangan Koridor Pariwisata Daerah.
 - c. Melakukan diversifikasi atau keragaman daya tarik wisata.
3. Pembangunan Prasarana Umum dan Fasilitas Pariwisata

Kebijakan Pembangunan prasarana umum dan fasilitas pariwisata sebagai berikut :

- a. Membangun prasarana umum dan fasilitas pariwisata dalam mendukung pengembangan kawasan pariwisata
- b. Meningkatkan kualitas prasarana umum dan fasilitas pariwisata yang mendorong pertumbuhan daya saing Koridor Pariwisata Daerah

Strategi pembangunan prasarana umum dan fasilitas pariwisata sebagai berikut:

- a. Meningkatkan pemberian insentif untuk pembangunan fasilitas pariwisata dalam mendukung kawasan pariwisata.
- b. Mengembangkan prasarana dan infrastruktur dasar untuk mendukung kesiapan kawasan pariwisata sebagai destinasi wisata baru/rintisan dan/atau kawasan pariwisata yang akan dikembangkan pada masing-masing koridor yang telah ditetapkan.

Strategi untuk meningkatkan kualitas prasarana umum dan fasilitas pariwisata untuk mendorong pertumbuhan daya saing Koridor Pariwisata Daerah sebagai berikut:

- a. Mengembangkan dan menerapkan berbagai skema kemitraan antara pemerintah daerah dan swasta (public private partnership)
 - b. Mengembangkan dan menerapkan berbagai skema kemandirian pengelolaan
4. Pembangunan Aksesibilitas dan Transportasi

Kebijakan Pembangunan aksesibilitas dan transportasi pariwisata sebagai berikut:

- a. Pengembangan moda transportasi dalam mendukung pengembangan pariwisata daerah
- b. Pengembangan prasarana transportasi dalam mendukung pengembangan pariwisata daerah; dan
- c. Pengembangan sistem transportasi dalam mendukung pengembangan pariwisata.

Strategi pembangunan aksesibilitas dan transportasi pariwisata sebagai berikut:

- a. Mengembangkan sarana moda transportasi darat yang menghubungkan antar destinasi pariwisata dan antar Koridor Pariwisata Daerah
- b. Mengembangkan sarana dan prasarana transportasi darat yang menghubungkan antar destinasi pariwisata dan antar Koridor Pariwisata Daerah

5. Pemberdayaan Masyarakat

Kebijakan pemberdayaan masyarakat melalui pariwisata sebagai berikut :

- a. Peningkatan kapasitas dan peran serta masyarakat dalam pembangunan kepariwisataan
- b. Peningkatan usaha ekonomi masyarakat dibidang kepariwisataan
- c. Penguatan kesadaran wisata masyarakat.

Strategi pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan kepariwisataan sebagai berikut :

- a. Mengembangkan keterlibatan masyarakat dalam kepariwisataan melalui implementasi destination management organisation dalam pengembangan kepariwisataan
- b. Meningkatkan kapasitas produk layanan usaha ekonomi masyarakat dibidang pariwisata
- c. Mengembangkan regulasi yang berorientasi untuk mendorong pertumbuhan dan perkembangan sektor usaha kreatif yang dikembangkan oleh masyarakat lokal

6. Pengembangan Investasi Kepariwisata

Kebijakan pengembangan investasi dibidang pariwisata sebagai berikut :

- a. Mendorong tumbuh dan berkembangnya investasi dalam industri pariwisata
- b. Meningkatkan kemudahan investasi dibidang pariwisata
- c. Meningkatkan intensitas promosi investasi di bidang pariwisata baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

Strategi pengembangan investasi di bidang pariwisata, sebagai berikut:

- a. Meningkatkan perbaikan jasa pelayanan perijinan dan perpajakan untuk investasi penanaman modal.
- b. Mendorong terciptanya Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata
- c. Mengembangkan sistim informasi investasi dibidang pariwisata;
- d. Meningkatkan promosi investasi di bidang pariwisata
- e. Meningkatkan sinergi promosi penanaman modal bidang pariwisata dengan sektor terkait.

Pembangunan Pemasaran Pariwisata adalah upaya terpadu dan sistematis dalam rangka menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan kepariwisataan dan seluruh pemangku kepentingannya.

Strategi Pengembangan Pemasaran Pariwisata

- a. Pengembangan Pasar Wisatawan

Aspek pasar wisatawan menentukan pengembangan produk wisata yang ditawarkan suatu kawasan wisata. Diperlukan pemahaman

tentang karakteristik pasar, baik kuantitas maupun kualitasnya, untuk kemudian menjadi pertimbangan dalam mengemas produk wisata, dan strategi pemasaran serta teknik promosi yang akan dilakukan. Kebijakan dan Strategi Pasar dan Pemasaran sebagai berikut:

Arah kebijakan pengembangan pasar wisatawan diwujudkan dalam bentuk pemantapan segmen pasar wisatawan massal dan pengembangan segmen ceruk pasar untuk mengoptimalkan pengembangan destinasi Pariwisata dan dinamika pasar global. Strategi untuk pemantapan segmen pasar wisatawan massal dan pengembangan segmen ceruk pasar sebagaimana dimaksud meliputi:

- 1) Meningkatkan pemasaran dan promosi untuk mendukung penciptaan destinasi pariwisata yang diprioritaskan
- 2) Mengembangkan promosi berbasis tema tertentu
- 3) Meningkatkan akselerasi pergerakan wisatawan di seluruh Destinasi Pariwisata
- 4) Meningkatkan intensifikasi pemasaran wisata konvensi, insentif dan pameran

b. Pengembangan Citra Pariwisata

Arah kebijakan pengembangan citra pariwisata sebagaimana dimaksud meliputi:

- 1) Pengembangan dan pemantapan citra pariwisata Kabupaten Kerinci sebagai destinasi pariwisata.
- 2) Pengembangan citra pariwisata Kabupaten Kerinci sebagai Destinasi Pariwisata yang aman, nyaman, dan berdaya saing.

Strategi untuk peningkatan dan pemantapan citra pariwisata Kabupaten Kerinci sebagaimana dimaksud meliputi :

- 1) Meningkatkan dan memantapkan pemosisian citra pariwisata Kabupaten Kerinci di antara para pesaing
- 2) Meningkatkan kehadiran media dalam rangka meningkatkan citra positif pariwisata Kabupaten Kerinci.
- 3) Peningkatan dan pemantapan pemosisian citra pariwisata Kabupaten Kerinci di antara para pesaing pada kekuatan-kekuatan utama yang meliputi:
 - a) Pertumbuhan ekonomi daerah yang semakin meningkat
 - b) Dukungan dan komitmen Pemerintah Daerah dalam pembangunan kepariwisataan
 - c) Kaya akan potensi wisata alam, sejarah, budaya, dan keunggulan komparatif
 - d) Infrastruktur dan aksesibilitas yang memadai

7. Pengembangan Kemitraan Pemasaran Pariwisata

Arah kebijakan pengembangan kemitraan pemasaran pariwisata sebagai berikut:

- a. Pengembangan kemitraan pemasaran yang terpadu, sinergis, berkesinambungan dan berkelanjutan
- b. Peningkatan peran media komunikasi dalam memasarkan dan mempromosikan wisata.

Strategi untuk pengembangan kemitraan pemasaran terpadu, sinergis, berkesinambungan dan berkelanjutan adalah :

- a. Meningkatkan keterpaduan sinergis promosi antar pemangku kepentingan pariwisata
- b. Mengembangkan strategi pemasaran berbasis pada pemasaran yang bertanggung jawab, yang menekankan tanggung jawab terhadap masyarakat, sumber daya lingkungan dan wisatawan.

Strategi untuk Peningkatan peran media komunikasi dalam memasarkan dan mempromosikan wisata adalah sebagai berikut :

- a. Mengoptimisasi pemanfaatan media komunikasi pemasaran, baik media cetak maupun media elektronik; dan
- b. Mengembangkan *e-marketing* Pariwisata

Pembangunan Industri Pariwisata adalah upaya terpadu dan sistematis dalam rangka mendorong penguatan struktur industri pariwisata, peningkatan Pendapatan Asli Daerah, produk pariwisata, penguatan kemitraan usaha pariwisata, penciptaan kredibilitas bisnis, dan pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan.

8. Strategi Pembangunan Usaha Pariwisata

a. Penguatan Struktur Industri Pariwisata

Arah kebijakan penguatan struktur industri pariwisata diwujudkan dalam bentuk penguatan fungsi, hierarki, dan hubungan antar mata rantai pembentuk Industri Pariwisata untuk meningkatkan daya saing Industri Pariwisata. Strategi untuk penguatan fungsi, hierarki, dan hubungan antar mata rantai pembentuk Industri Pariwisata meliputi :

- 1) Memfasilitasi pembentukan organisasi industri pariwisata.

- 2) Memperkuat mata rantai penciptaan nilai tambah antara pelaku Usaha Pariwisata dan sektor terkait.

b. Peningkatan Daya Saing Produk Pariwisata meliputi :

- 1) Daya saing Daya Tarik Wisata
- 2) Daya saing Fasilitas Pariwisata
- 3) Daya saing aksesibilitas.

Arah kebijakan peningkatan daya saing Daya Tarik Wisata diwujudkan dalam bentuk pengembangan kualitas dan keragaman usaha Daya Tarik Wisata. Strategi untuk pengembangan kualitas dan keragaman usaha Daya Tarik Wisata meliputi :

- 1) Mengembangkan manajemen atraksi
- 2) Memperbaiki kualitas interpretasi dan informasi
- 3) Memperkuat kualitas produk wisata
- 4) Meningkatkan pengemasan produk wisata.

Arah kebijakan peningkatan daya saing Fasilitas Pariwisata diwujudkan dalam bentuk pengembangan kapasitas dan kualitas fungsi dan layanan Fasilitas Pariwisata yang memenuhi standar internasional dan mengangkat unsur keunikan dan kekhasan lokal.

Strategi untuk pengembangan kapasitas dan kualitas fungsi dan layanan Fasilitas Pariwisata meliputi :

- 1) Mendorong dan meningkatkan standardisasi dan Sertifikasi Usaha Pariwisata
- 2) Mengembangkan skema fasilitasi untuk mendorong pertumbuhan Usaha Pariwisata skala mikro, kecil dan menengah; dan

- 3) Mendorong pemberian insentif untuk menggunakan produk dan tema yang memiliki keunikan dan kekhasan lokal.

Arah kebijakan peningkatan daya saing aksesibilitas diwujudkan dalam bentuk pengembangan kapasitas dan kualitas layanan jasa transportasi yang mendukung kemudahan perjalanan wisatawan ke Destinasi Pariwisata. Strategi untuk pengembangan kapasitas dan kualitas layanan jasa transportasi dilaksanakan melalui peningkatan etika bisnis dalam pelayanan usaha transportasi pariwisata.

c. Pengembangan Kemitraan Usaha Pariwisata

Arah kebijakan pengembangan kemitraan Usaha Pariwisata diwujudkan dalam bentuk pengembangan skema kerja sama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat.

Strategi untuk pengembangan skema kerja sama meliputi :

- 1) Mengembangkan pola-pola kerjasama industri lintas sektor antara pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat;
- 2) Memperkuat implementasi kerja sama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat; dan
- 3) Memperkuat monitoring dan evaluasi kerja sama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat.

d. Penciptaan Kredibilitas Bisnis

Arah kebijakan penciptaan kredibilitas bisnis diwujudkan dalam bentuk pengembangan manajemen dan pelayanan Usaha Pariwisata yang kredibel dan berkualitas.

Strategi untuk pengembangan manajemen dan pelayanan Usaha Pariwisata yang kredibel dan berkualitas meliputi :

- 1) Meningkatkan sistem dan skema fasilitasi untuk usaha pariwisata
- 2) Meningkatkan sistem dan skema regulasi untuk usaha pariwisata
- 3) Meningkatkan penggunaan teknologi informasi dalam usaha-usaha di kawasan pariwisata.

e. Pengembangan Tanggung Jawab Terhadap Lingkungan

Arah kebijakan pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan diwujudkan dalam bentuk pengembangan manajemen Usaha Pariwisata yang mengacu kepada prinsip-prinsip Pembangunan pariwisata berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Strategi untuk pengembangan manajemen Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud meliputi:

- 1) Mendorong tumbuhnya industri yang ramah lingkungan di Koridor-Koridor Pariwisata Daerah
- 2) Mengembangkan manajemen Usaha Pariwisata yang peduli terhadap pelestarian lingkungan dan budaya.

9. Strategi Pengembangan Kelembagaan

Pembangunan Kelembagaan Kepariwisataan adalah upaya terpadu dan sistematis dalam rangka pengembangan organisasi kepariwisataan, pengembangan sumber daya manusia pariwisata untuk mendukung dan meningkatkan kualitas pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan kepariwisataan di destinasi pariwisata. Pembangunan Kelembagaan Kepariwisataan meliputi:

a. Penguatan Organisasi Kepariwisata

Arah kebijakan penguatan Organisasi Kepariwisata meliputi:

- 1) Optimalisasi Koordinasi Antar Dinas
- 2) Optimalisasi Organisasi Kepariwisata Swasta dan Masyarakat
- 3) Optimalisasi Kemitraan Usaha Pariwisata Antara Pemerintah Daerah, Swasta dan Masyarakat.

Strategi penguatan Organisasi Kepariwisata meliputi:

- 1) Merencanakan partisipatif koordinasi lintas sektor (merujuk pada Inpres 16 tahun 2005 tentang Arah kebijakan Pembangunan Kebudayaan dan Pariwisata)
- 2) Mendorong peran serta swasta dalam meningkatkan akselerasi pembangunan kepariwisataan melalui Public-private Partnership (PPP);
- 3) Mengembangkan dan revitalisasi organisasi masyarakat di bidang pariwisata
- 4) Memperkuat sinkronisasi antara pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat
- 5) Memperbaiki pelayanan pemerintah kepada swasta dan masyarakat.

b. Pembangunan Sumber Daya Manusia Pariwisata

Arah kebijakan Pembangunan Sumber Daya Manusia Pariwisata meliputi :

- 1) Optimalisasi dan Akselerasi Kompetensi SDM Pemerintah
- 2) Optimalisasi Kuantitas SDM Industri Pariwisata.

Strategi untuk pembangunan SDM pariwisata meliputi:

- 1) Optimalisasi kapasitas SDM yang terlibat didalam industry kepariwisataan
- 2) Mempetakan kualifikasi kompetensi SDM
- 3) Mendorong tumbuhnya institusi yang menawarkan program pendidikan pariwisata
- 4) Mengembangkan kerjasama antara institusi pendidikan dan industri pariwisata
- 5) Pemetaan kebutuhan SDM pariwisata pada masing-masing koridor wisata

c. Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan

Arah kebijakan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan untuk mendukung pembangunan pariwisata sebagaimana dimaksud meliputi :

- 1) Peningkatan penelitian pengembangan destinasi Pariwisata
- 2) Peningkatan penelitian pengembangan Pemasaran Pariwisata
- 3) Peningkatan penelitian pengembangan Industri Pariwisata
- 4) Peningkatan penelitian pengembangan kelembagaan dan SDM Pariwisata.

Strategi untuk peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan Destinasi Pariwisata sebagaimana dimaksud meliputi:

- 1) Meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan Daya Tarik Wisata

- 2) Meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan aksesibilitas dan/atau transportasi Kepariwisataaan dalam mendukung daya saing destinasi pariwisata daerah Kabupaten Kerinci
- 3) Meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan Prasarana Umum, Fasilitas Umum dan Fasilitas Pariwisata dalam mendukung daya saing destinasi pariwisata daerah Kabupaten Kerinci;
- 4) Meningkatkan penelitian dalam rangka memperkuat Pemberdayaan Masyarakat melalui Kepariwisataaan; dan
- 5) Meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan dan peningkatan investasi di bidang pariwisata.

Strategi untuk peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan Pemasaran Pariwisata sebagaimana dimaksud meliputi:

- 1) Meningkatkan penelitian pasar wisatawan dalam rangka pengembangan pasar baru dan pengembangan produk; meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan dan penguatan citra pariwisata Kabupaten Kerinci.
- 2) Meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan kemitraan Pemasaran Pariwisata
- 3) Meningkatkan penelitian dalam rangka peningkatan peran promosi pariwisata daerah Kabupaten Kerinci di luar negeri.

Strategi untuk peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan Industri Pariwisata sebagaimana dimaksud meliputi :

- 1) Meningkatkan penelitian dalam rangka penguatan Industri Pariwisata

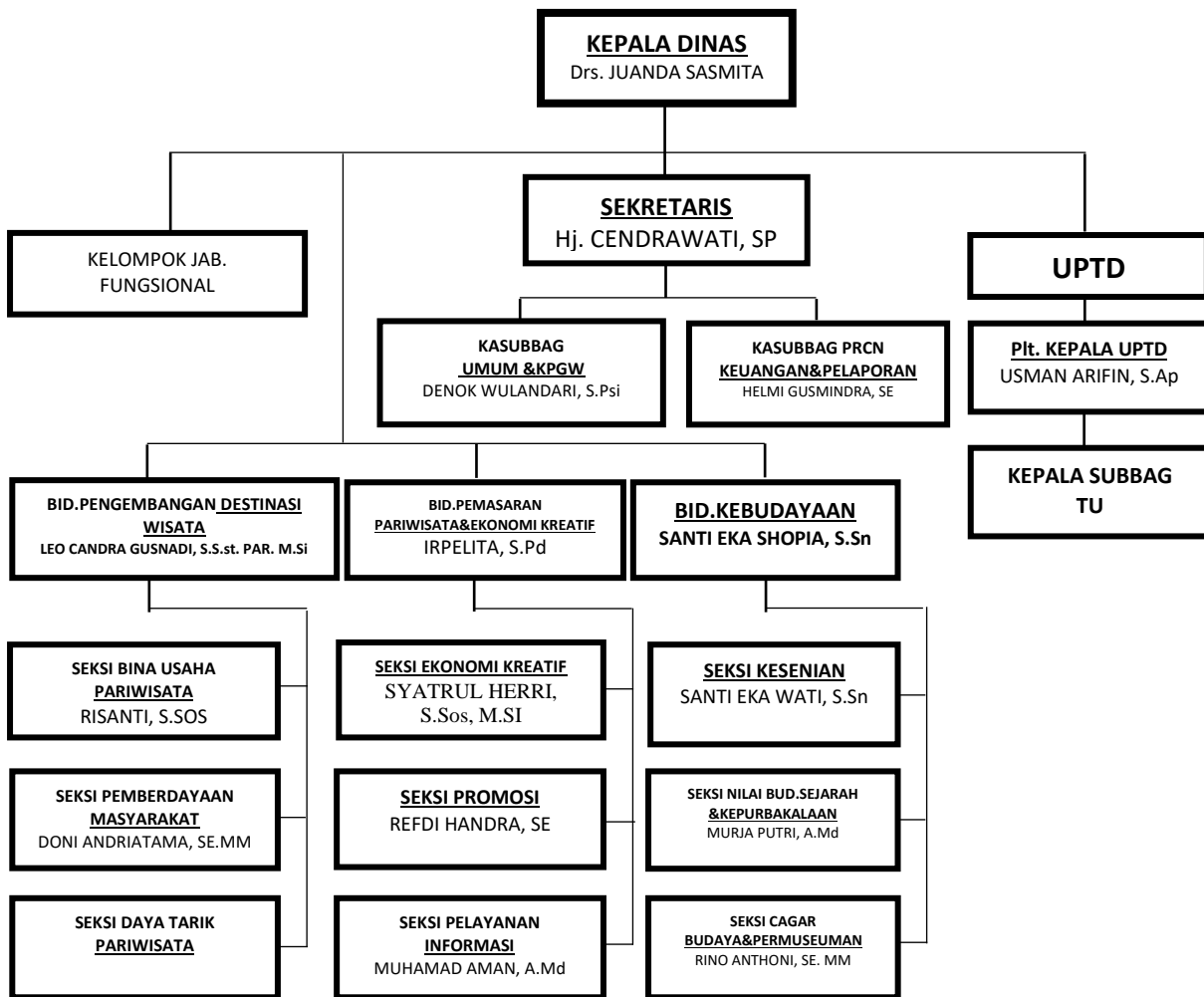
- 2) Meningkatkan penelitian dalam rangka peningkatan daya saing produk pariwisata
- 3) Meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan kemitraan Usaha Pariwisata
- 4) Meningkatkan penelitian dalam rangka penciptaan kredibilitas bisnis
- 5) Meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan.

Strategi untuk peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan kelembagaan dan SDM Pariwisata sebagaimana dimaksud meliputi :

- 1) Meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan Organisasi Kepariwisataan
- 2) Meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan SDM Pariwisata

Dalam pengelolaan pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kerinci memiliki bagan strukrur organisasi sebagai berikut:

**STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KERINCI**



Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kerinci 2021

Pengelolaan ekowisata yang dilakukan Unit Pelaksana Teknis Daerah melalui Balai Besar Taman Nasional Kerinci Seblat diketahui bahwa Taman Nasional Kerinci Seblat merupakan kawasan konservasi yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No.901/Kpts-II/1999 seluas ±1.375.349,867 ha dan pada tahun 2004 Menteri Kehutanan menetapkan perubahan fungsi kawasan hutan Sipurak Hook seluas ±14.160 ha menjadi bagian dari kawasan TNKS dengan surat Keputusan Nomor.420/Menhut-

II/2004, sehingga luas kawasan TNKS menjadi $\pm 1.389.509,867$ ha. Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.07/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016 tanggal 10 Februari 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Taman Nasional, Balai Besar Taman Nasional Kerinci Seblat (BBTNKS) bertugas melakukan penyelenggaraan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dan pengelolaan kawasan taman nasional berdasarkan peraturan perundang-undangan.

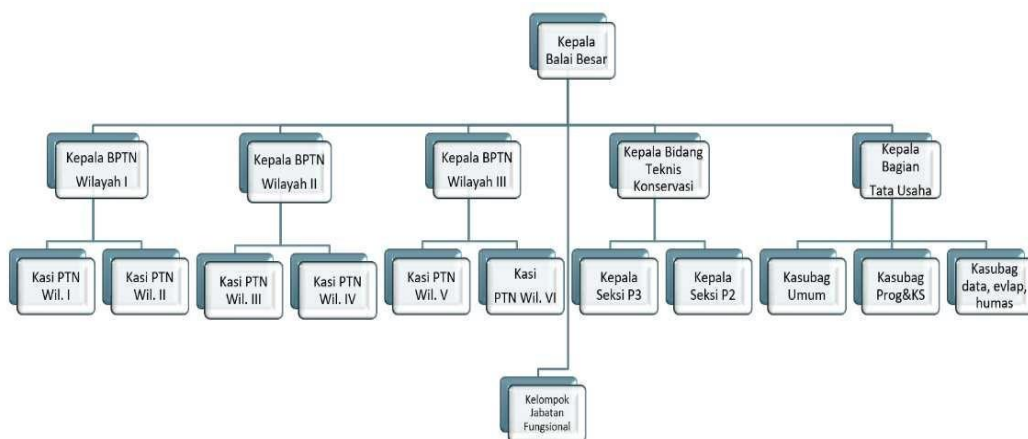
Dalam penyelenggaraan tugas tersebut Balai Besar Taman Nasional Kerinci Seblat juga melaksanakan fungsi sebagai berikut:

1. Inventarisasi potensi, penataan kawasan dan penyusunan rencana pengelolaan;
2. Perlindungan dan pengamanan kawasan hutan;
3. Pengendalian dampak kerusakan sumber daya alam hayati;
4. Pengendalian kebakaran hutan;
5. Pengembangan dan pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar untuk kepentingan non komersial;
6. Pengawetan jenis tumbuhan dan satwa liar beserta habitatnya serta sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional di dalam kawasan;
7. Pengembangan dan pemanfaatan jasa lingkungan;
8. Evaluasi kesesuaian fungsi, pemulihan ekosistem dan penutupan kawasan;
9. Penyediaan data dan informasi, promosi dan pemasaran konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya;

10. Pengembangan kerjasama dan kemitraan bidang konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya;
11. Pengembangan kerjasama dan kemitraan bidang konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya;
12. Pemberdayaan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan;
13. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga serta kehumasan.

Dalam melakukan tugasnya Balai Besar Taman Nasional Kerinci Seblat memiliki bagan struktur organisasi sebagai berikut:

STRUKTUR ORGANISASI BALAI BESAR TAMAN NASIONAL KERINCI SEBLAT



Sumber : Balai Besar Taman Nasional Kerinci Seblat Tahun 2021

Dalam rangka optimalisasi pengelolaan taman nasional, secara struktur organisasi terdapat pengembangan penyempurnaan organisasi dan tata kerja unit pelaksana taman nasional. Balai Besar Taman Nasional Kerinci Seblat dikembangkan menjadi Balai Besar Taman Nasional Tipe A dengan susunan organisasi yang terdiri dari:

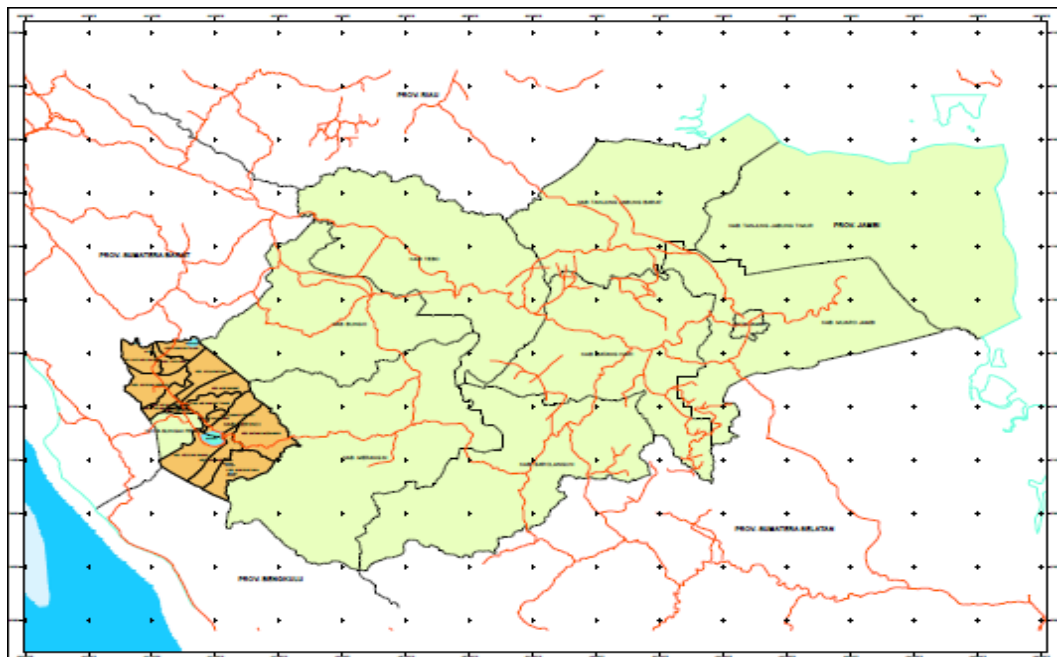
1. Bagian Tata Usaha, terbagi menjadi tiga subbagian yaitu: Subbagian Umum, Subbagian Program dan Kerjasama, dan Subbagian Data, Evaluasi, Pelaporan dan Humas.
2. Bidang Teknis Konservasi, terbagi menjadi dua seksi yaitu: Seksi Perencanaan, Perlindungan dan Pengawetan, dan Seksi Pemanfaatan dan Pelayanan.
3. Bidang Pengelolaan Taman Nasional (BPTN) Wilayah, yang terdiri dari 3 BPTN wilayah, yaitu: BPTN Wilayah I Jambi dengan 2 Seksi Pengelolaan Taman Nasional (SPTN) yaitu SPTN Wilayah I Kerinci dan SPTN Wilayah II Bungo, BPTN wilayah II Sumatra Barat yang terdiri dari SPTN Wilayah III Painan dan SPTN Wilayah IV Sangir, dan BPTN wilayah III Bengkulu-Sumsel yang terdiri dari SPTN Wilayah V Lubuk linggau dan SPTN Wilayah VI Argamakmur.
4. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari kelompok Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan, Kelompok Jabatan fungsional Pengendali Ekosistem Hutan, Kelompok Jabatan Penyuluh Kehutanan dan Penggerak Swadaya Masyarakat.

Khusus Kawasan Alam Danau Gunung Tujuh dan Gunung Kerinci oleh karena berada dalam Kawasan TNKS, telah dilakukan Perjanjian Kerja Sama antara Kepala Balai Besar Taman Nasional Kerinci Seblat dengan Bupati Kerinci Nomor : PKS.06 T.1/BIDTEK/KSA/9/2017, Nomor : 6/HK/2017. Selanjutnya telah pula dilakukan Rencana Pelaksanaan Program (RPP) tahun 2018 – 2022 atas Perjanjian Kerja Sama dimaksud tentang Program dan Kegiatan Penguatan fungsi tentang pengembangan Objek wisata

Gunung Tujuh dan Gunung Kerinci pada Zona Pemanfaatan Taman Nasional Kerinci Seblat – Kabupaten Kerinci.

Kabupaten Kerinci memiliki topografi wilayah yang bervariasi berupa perbukitan dan pegunungan. Sebagian wilayah (45,89 %) Kabupaten Kerinci terletak di ketinggian 1.000-1.500 mdpl dengan luas 152.757 Ha, sementara daerah berketinggian diatas 2.500 mdpl seluas 848 Ha (0,25%), dan wilayah yang berada antara 0-500 mdpl hanya 3.535 Ha (1,06 %). Secara umum wilayah Kabupaten Kerinci dapat dikelompokkan dalam beberapa satuan morfologi yaitu dataran, perbukitan bergelombang halus sampai perbukitan gelombang sedang dan pegunungan. Berikut merupakan Peta Kabupaten Kerinci:

PETA DENAH KABUPATEN KERINCI



Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2021

Kabupaten Kerinci merupakan salah satu wilayah di bagian Barat Propinsi Jambi yang berbatasan langsung dengan Provinsi Sumatera Barat dan

Propinsi Bengkulu, dengan luas wilayah kurang lebih 3.808,50 Km². Secara umum wilayah Kabupaten Kerinci memiliki batas administrasi sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Solok Selatan Provinsi Sumatera Barat;
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Merangin Provinsi Jambi dan Kabupaten Muko-Muko Propinsi Bengkulu;
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi dan Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat;
4. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Bungo dan Kabupaten Merangin Provinsi Jambi.

Destinasi pariwisata atau yang disebut juga dengan daerah tujuan pariwisata, adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang didalamnya terdapat daya tarik wisata, prasarana umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, investasi serta pemberdayaan masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan. Pembangunan destinasi pariwisata yang berkualitas, berkelanjutan dan berbasis masyarakat menjadi penting dilakukan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat dan untuk memenuhi harapan serta ekspektasi wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Kerinci.

Pemanfaatan sumber daya yang saat ini ada juga harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian, terpadu dan berkelanjutan. Dengan demikian, maka dapat dimengerti betapa pentingnya penatagunaan lahan, ruang dan bangunan untuk menjaga potensi wisata di Kabupaten Kerinci. Saat pengamatan lapangan dilakukan, di beberapa kawasan telah terlihat adanya

daya tarik wisata yang belum dikemas sedemikian rupa. Diantara objek wisata tersebut ditampilkan pada tabel dibawah ini.

Tabel 1
Wisata Alam Kabupaten Kerinci

NO	NAMA OBJEK WISATA	JENIS OBJEK WISATA
1	Pemandian Air Panas Sungai Medang	Wisata Alam
2	Air Terjun 13 Tingkat Sungai Medang	Wisata Alam
3	Gunung Kaca	Wisata Alam
4	Air Terjun Pungut	Wisata Alam
5	Air Panas Sungai Abu	Wisata Alam
6	Panorama Bukit Villa Kemantan	Wisata Alam
7	Batu Jung Kemantan Kebalai	Wisata Alam
8	Air Terjun Pancuran Tujuh	Wisata Alam
9	Gia kapeh	Wisata Alam
10	Air Terjun Siulak Kecil	Wisata Alam
11	Air Terjun Pauh Tinggi	Wisata Alam
12	Air Terjun Telun Berasap	Wisata Alam
13	Gunung Kerinci	Wisata Alam
14	Danau Gunung Tujuh	Wisata Alam
15	Danau Belibis	Wisata Alam
16	Rawa Ladeh Panjang	Wisata Alam
17	Goa Kasah	Wisata Alam
19	Aroma Pecco	Wisata Alam
21	Ar Terjun Koto Lebu Tinggi	Wisata Alam
22	Bukit Sembahyang	Wisata Alam
23	Air Tejun Puti Mayang	Wisata Alam
25	Hutan Adat Lekuk 50 Tumbi Lempur	Wisata Alam
26	Daau Lingkat	Wisata Alam
27	Air Terjun Siluag Bersisik Emas	Wisata Alam
28	Gerao Rasau	Wisata Alam
29	Air Terjun Ksen	Wisata Alam
30	Danau Kaco	Wisata Alam
31	Air Panas Semurup	Wisata Alam
32	Danau Kecik Lempur	Wisata Alam
33	Gerao Nguak Lempur Tengah	Wisata Alam
34	Gunung Batuah Lempur	Wisata Alam
35	Air Terjun Telun Lempur	Wisata Alam
36	Gunung Raya Talang Kemuning	Wisata Alam
37	Gerao Silai Talang Kemuning	Wisata Alam
38	Hutan Salak Talang Kemuning	Wisata Alam

39	Taman Dewa Talang Kemuning	Wisata Alam
40	Batu Meriam Talang Kemuning	Wisata Alam
41	Batu Kursi Lempur Mudik	Wisata Alam
42	Batu Berurat Lempur Mudik	Wisata Alam
43	Air Terjun Mata Kucing Masgo	Wisata Alam
44	Batu Biduk Pulau Sangkar	Wisata Alam
45	Batu Megalitik Muak	Wisata Alam
46	Goa dan Air Terjun Pacah Sago Batang Merangin	Wisata Alam
47	Sungai Batang Merangin	Wisata Alam
48	Lembah Merangin	Wisata Alam
49	danau Alkab Tamiai	Wisata Alam
50	Tanjung Pelita Pidung	Wisata Alam
51	Hutan Adat Temedak Keluru	Wisata Alam
52	Air Terjun Pancuran Rayo Pulau Tengah	Wisata Alam
53	Air Terjun Pancuran Gading Pulau tengah	Wisata Alam
54	Batu Raja Pulau Tengah	Wisata Alam
55	Goa Belang Sanggaran Agung	Wisata Alam
56	Goa Kelelawar Talang Kemulun	Wisata Alam
57	Bukit Kuttingga/ Anjung Banio Penawar	Wisata Alam
58	Serujung Angin Hiang Karya	Wisata Alam
59	Air Terjun Muara Air Duo	Wisata Alam
60	Panorama Bukit Tapan Sekungkung	Wisata Alam
61	Air Terjun Pendung Semurup	Wisata Alam
62	Batu Lumang Muara Semarah Semurup	Wisata Alam
63	Air Terjun 12 Tingkat Talang Kemulun	Wisata Alam
64	Goa Batu Tanjung Tanah	Wisata Alam

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kerinci tahun 2021

Untuk meningkatkan pembangunan pariwisata, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten kerinci mempunyai Visi dan Misi sebagai berikut:

Visi pengembangan pariwisata Kabupaten Kerinci adalah Mewujudkan pariwisata Kabupaten Kerinci yang berdaya saing dan mampu memndukung peningkatan perekonomian daerah.

Misi pengembangan pariwisata Kabupaten Kerinci merupakan suatu upaya yang harus dilaksanakan sesuai dengan visi yang telah ditetapkan. Hal ini berarti misi yang akan dilaksanakan disusun dalam kerangka visi pengembangan pariwisata dan pengembangan wilayah Kabupaten Kerinci

secara keseluruhan dengan mempertimbangkan karakteristik potensi yang ada. Misi pengembangan pariwisata Kabupaten Kerinci antara lain adalah sebagai berikut:

1. Mengembangkan produk wisata yang variatif dan memiliki ciri khas sehingga mampu menarik kunjungan wisatawan
2. Mengembangkan pariwisata yang mampu memberikan pemasukan terhadap Pendapatan Asli Daerah
3. Mengoptimalkan penataan dan pengelolaan destinasi pariwisata
4. Mengembangkan industri pariwisata dan menggerakkan kemitraan usaha
5. Meningkatkan pemasaran pariwisata melalui kerjasama dengan daerah lain secara sinergis
6. Meningkatkan pembangunan sarana prasarana pendukung pariwisata
7. Meningkatkan peran dan kinerja lembaga pariwisata yang kreatif dan inovatif

Sasaran pengembangan pariwisata Kabupaten Kerinci antara lain sebagai berikut :

1. Terwujudnya destinasi pariwisata kabupaten kerinci yang berkualitas dan berdaya saing.
2. Terwujudnya industri pariwisata yang mampu mendorong terciptanya lapangan kerja bagi masyarakat.
3. Terwujudnya pemasaran pariwisata yang efektif dan efisien dalam rangka meningkatkan kunjungan wisata.
4. Terwujudnya pembangunan sarana dan prasarana pariwisata daerah yang terintegrasi dan mampu mendorong pertumbuhan industri wisata.

5. Mewujudkan kelembagaan dan tata kelola yang mampu mendorong partisipasi aktif kelompok masyarakat.

B. Kendala-kendala yang dihadapi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam pembangunan ekowisata di Kabupaten Kerinci

Di dalam pengembangan ekowisata di Kabupaten Kerinci, pasti memiliki kendala-kendala yang dihadapi terutama oleh instansi terkait yang secara langsung menangani hal tersebut. Kendala yang dihadapi oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kerinci dalam pembangunan ekowisata adalah masyarakat belum begitu paham dan belum begitu merasakan manfaat dari ekowisata. Padahal manfaatnya besar sekali untuk masyarakat di zona ekowisata¹⁵

Permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan kepariwisataan Kabupaten Kerinci adalah :

1. Aksesibilitas menuju Kabupaten Kerinci rendah

Aksesibilitas menuju dan keluar kabupaten kerinci perlu menjadi perhatian pemerintah Kabupaten Kerinci kerana merupakan faktor penting dalam memajukan pariwisata di Kabupaten Kerinci sehingga memudahkan para wisatawan untuk berkunjung ke Kabupaten Kerinci yang secara tidal langsung bisa meningkatkan pendapatan daerah Kabupaten Kerinci.

2. Kurangnya anggaran pengembangan objek destinasi tempat wisata

Untuk pengembangan objek wisata di Kabupaten Kerinci ke depan perlu adanya ketersediaan anggaran pengembangan pariwisata kedepan sehingga pariwisata Kabupaten Kerinci mampu berdaya saing dengan daerah lain.

3. Sumber Daya Manusia rendah dalam mendukung pariwisata

¹⁵ Wawancara dengan Leo Candra Gusnadi, selaku Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Wisata, pada tanggal 16 Juni 2021 pukul 01.30 WIB

Perlunya adanya pelatihan dan pengetahuan masyarakat Kabupaten Kerinci untuk pengembangan pariwisata Kabupaten Kerinci dalam hal ini sangat membutuhkan kerjasama pemerintah daerah.

4. Laju Produk Domestik Regional Bruto sektor pariwisata

Sejalan dengan pengembangan pariwisata kabupaten kerinci dengan mengembangkan objek wisata dan tersedianya sarana dan prasarana wisata yang memadai, serta aksesibilitas menuju dan keluar kabupaten kerinci yang lebih baik sehingga dengan sendirinya laju pertumbuhan PDRB di sektor pariwisata juga akan naik.

5. Belum optimalnya pemenuhan sarana prasarana pendukung pariwisata

Dalam pengembangan pariwisata tidak hanya objek wisata yang menjadi perhatian pemerintah daerah namun ketersediaan sarana dan prasarana di objek wisata juga perlu menjadi perhatian pemerintah daerah.

C. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala yang dihadapi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam pembangunan ekowisata di Kabupaten Kerinci

Berkaitan dengan kendala-kendala yang dihadapi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kerinci dalam pembangunan ekowisata, upaya yang dilakukan oleh dinas terkait dalam mengatasi kendala-kendala tersebut adalah meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang pentingnya menjaga ekowisata dengan melakukan sosialisasi masyarakat di zona ekowisata¹⁶

Aksesibilitas kabupaten kerinci perlu menjadi perhatian pemerintah Kabupaten Kerinci dengan melakukan upaya pemerataan pembangunan akses jalan menuju Kabupaten Kerinci untuk memudahkan para wisatawan untuk berkunjung ke Kabupaten Kerinci. Untuk pengembangan objek wisata di Kabupaten Kerinci dilakukan peningkatan anggaran pengembangan pariwisata agar pariwisata Kabupaten Kerinci mampu bersaing dengan daerah lain. Pelatihan dan peningkatan pengetahuan yang dilakukan kepada masyarakat Kabupaten Kerinci untuk pengembangan pariwisata. Dengan diperbaikinya beberapa sektor pariwisata seperti sarana dan prasarana, aksesibilitas maka dengan sendirinya laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto di sektor pariwisata juga akan naik. Dalam pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana di Kabupaten Kerinci maka dilakukan lah koordinasi dengan pihak terkait dengan kerangka kebijakan regulasi maupun kerangka kebijakan investasi melalui rehabilitasi kapasitas layanan infrastruktur yang rusak dan peningkatan

¹⁶ Wawancara dengan Leo Candra Gusnadi, selaku Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Wisata, pada tanggal 16 Juni 2021 pukul 01.30 WIB

kapasitas layanan melalui pembangunan baru. Melalui dua kerangka kebijakan tersebut diharapkan ketersediaan fasilitas dan layanan infrastruktur dapat meningkat terutama untuk mempercepat pemulihan infrastruktur yang rusak.

Dukungan program dari Provinsi Jambi di Kabupaten Kerinci, yakni antara lain:

1. Dukungan peningkatan/pengembangan sarana Bandara Depati Parbo,
2. Peningkatan Jalan Propinsi Jambi ruas Bangko – Kerinci – Batas Sumbar perubahan status Jalan Propinsi menjadi Jalan Nasional,
3. Pemotongan tikungan tajam di ruas Jalan Nasional maupun Provinsi,
4. Lanjutan pembukaan ruas Jalan baru ; Kelok Sago – Tanjung Batu,
5. Pembangunan sarana maupun prasarana objek wisata di danau kerinci, meliputi ; lokasi Festival Kerinci, dan pembangunan dermaga danau kerinci,
6. Fasilitasi Dana Alokasi Khusus(DAK) maupun dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara masuk ke Kabupaten Kerinci,
7. dan lain-lain program/kegiatan dari Organisasi Perangkat Daerah penunjang Kepariwisataaan.

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan

1. Pelaksanaan tugas dan wewenang Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kerinci adalah melakukan pengawasan dan membuat kebijakan atau regulasi yang mendukung pembangunan ekowisata di Kabupaten Kerinci dan ekowisata dikelola oleh Balai Taman Nasional Kerinci Seblat sebagai perpanjangan tangan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam menjaga lingkungan hidup, lingkungan sosial dan adat di daerah ekowisata.
2. Kendala-kendala yang dihadapi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kerinci dalam pembangunan ekowisata adalah masyarakat tidak begitu paham pentingnya dan sangat bermanfaatnya ekowisata yang bertujuan untuk mengkonservasi lingkungan, melestarikan
3. Upaya yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam mengatasi kendala-kendala tersebut adalah meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang pentingnya menjaga ekowisata untuk wilayah ekowisata itu sendiri.

B. Saran

Dengan harapan semakin berkembangnya ekowisata di Kabupaten Kerinci diharapkan bisa lebih meningkatkan ekonomi masyarakat yang tinggal di sekitar wilayah ekowisata. Berikut beberapa saran yang bisa diberikan peneliti, diantaranya:

1. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kerinci harus lebih meningkatkan pengawasan terhadap pembangunan ekowisata agar kedepannya ekowisata di Kabupaten Kerinci dapat meningkat dengan pesat dan masyarakat di daerah ekowisata dapat merasakan manfaatnya.
2. Agar Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kerinci dapat melakukan pelatihan dan juga sosialisasi pada masyarakat yang tinggal di daerah ekowisata secara masif sehingga nantinya ekowisata di Kabupaten Kerinci bisa memberikan pengaruh besar bagi masyarakat.
3. Agar Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kerinci lebih serius dalam melakukan pembangunan ekowisata supaya ekowisata di Kabupaten Kerinci dapat berkembang dengan baik seperti ekowisata di daerah lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Arjana, I Gusti Bagus. 2016, *Geografi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Bambang Sunaryo, 2013, *Kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata*, Gava Media, Yogyakarta.
- Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Gamal Suwanto, 2004, *Dasar-Dasar Pariwisata*, Andi, Yogyakarta.
- I Nyoman Sudiarta, Putu Eka Wirawan, 2018, *Daya Tarik Wisata Jogging Track*, Nilacakra, Bali.
- Iwan Nugroho, 2015, *Ekowisata dan Pembangunan Berkelanjutan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Muljadi, 2010, *Kepariwisata dan Perjalanan*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Oka A. Yoeh, et.all, 2006, *Pariwisata Budaya Masalah Dan Solusinya*, PT Pradnya Paramita, Jakarta.

B. Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 *tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*.

PERDA No 2 Tahun 2018 *tentang Penyelenggaraan Pariwisata*.

C. Sumber Lain

Khotimah, K., & Wilopo, W. 2017, *Strategi pengembangan destinasi pariwisata budaya* (Studi kasus pada kawasan Situs Trowulan sebagai Pariwisata Budaya Unggulan di Kabupaten Mojokerto). *Jurnal Administrasi Bisnis*.

Yoeti, O. A., 2015, *Ecotourism, Pariwisata Berwawasan Lingkungan*, <https://studipariwisata.com/analisis/ecotourism-pariwisata-berwawasan-lingkungan/#:~:text=Ekowisata%20adalah%20suatu%20jenis%20pariwisata,sekitarnya%20dengan%20melibatkan%20penduduk%20lokal>. Diakses 11 December 2020 jam 22.40 Wib

Page S.J., dan Ross, D.K. 2002. *Ecotourism Pearson Education Limited*, Prentice Hall, Pearson Education, China. <https://www.kajianpustaka.com/2019/12/ekowisata-pengertian-prinsip-karakteristik-dan-jenis.html>. Diakses 11 December 2020 jam 23.00 Wib